

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP KEMUNGKINAN  
PEMBERIAN OPINI AUDIT *GOING CONCERN*  
OLEH AUDITOR INDEPENDEN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2009-2011)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**EMA DIANDRA ADJANI  
NIM. C2C009057**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ema Diandra Adjani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009057  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEMUNGKINAN PEMBERIAN OPINI AUDIT *GOING CONCERN* OLEH AUDITOR INDEPENDEN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)**  
  
Dosen Pembimbing : Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 13 Maret 2013

Dosen Pembimbing,

Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 1976 0525 2000604 1002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Ema Diandra Adjani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009057  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEMUNGKINAN PEMBERIAN OPINI AUDIT *GOING CONCERN* OLEH AUDITOR INDEPENDEN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)**

**Telah dinyatakan lulus ujian tanggal 21 Maret 2013**

**Tim penguji:**

1. Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt (.....)
3. Dra. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ema Diandra Adjani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: : **ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEMUNGKINAN PEMBERIAN OPINI AUDIT GOING CONCERN OLEH AUDITOR INDEPENDEN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

Ema Diandra Adjani  
NIM. C2C009057

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

*"Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa"*

*(Roma 12 : 12)*

*"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu"*

*(Lukas 11 : 9)*

***Skripsi ini ku persembahkan untuk:***

*Ayah, ibu, dan adik tercinta.*

*Partner dan sahabat-sahabatku tersayang*

*Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan doanya yang senantiasa mengiringi setiap langkahku.*

*You're the greatest gift from God and I'm be thankful to have you all.*

*I'll make you all proud of me.*

## **ABSTRACT**

*The aim of this study is to examine the effect of the role of corporate governance to the possibility of issuance of going concern audit opinion by an independent auditor. The independent variables are used in this study is the proportion of independent directors, managerial ownership, and institutional ownership.*

*This study is a replication of the study by Iskandar et al., (2011) and used 84 manufacturing companies which listed on the Stock Exchange in the period 2009-2011 as the sample. Samples were selected by purposive sampling method and finally obtained 38 companies manufacturing a going concern audit opinion and 46 manufacturing companies with non-going concern audit opinion. Data were analyzed using logistic regression analysis model.*

*The results show that the proportion of independent directors and institutional ownership has no effect on the issuance of going concern audit opinion by an independent auditor, while managerial ownership affect the administration going concern audit opinion by an independent auditor.*

*Keywords : corporate governance, the proportion of independent directors, managerial ownership, and institutional ownership and going concern audit opinion.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran *corporate governance* terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al., (2011) dengan menggunakan 84 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 38 perusahaan manufaktur dengan opini audit *going concern* dan 46 perusahaan manufaktur dengan opini audit *non going concern*. Data dianalisis menggunakan model analisis regresi logistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

Kata kunci : *corporate governance*, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan opini audit *going concern*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan perlindunganNya yang selalu menyertai penulis tiada henti, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Kemungkinan Pemberian Opini Audit Going Concern oleh Auditor Independen (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011)**” dengan lancar dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu bila tidak ada dukungan, doa, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan bantuan berupa arahan dan saran selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Ibu Nur Cahyonowati S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dalam perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro untuk ilmu bermanfaat yang telah diajarkan dan seluruh staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas bantuannya.
6. Orang tua tercinta, Bapak Stephanus Maryono dan Ibu Rosa Lilis D.A, serta adikku tercinta Julius Caesar Ema D.R, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.



7. Ivan Herdyanto yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam banyak hal, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini. *You're the best partner.*
8. Sahabat-sahabat karib dari kecil, Dita, Yossi, dan Vega. *I'm be thankful to be part of you girls! Keep dreaming and get it!.*
9. Sahabat-sahabat terbaik SMA, Raras, Vina, Dian, Hasna, dan Maretta yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih untuk waktunya, dukungan, dan persahabatan yang masih. *You're the best friend ever girls!.*
10. Sahabat-sahabat akuntansi, Liste, Lovink, Ridho, Domi, Mahe, Putu, Ami, Prima, Erlin, Ina, Leo, Tami, Mona, Andreas, Sigit dan Leditya yang selalu siap membantu dan selalu ada dalam suka maupun duka selama perkuliahan ini. *I'm glad to have you guys.*
11. Fauziah Nurul Fadhilah dan Mayco Defrio yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk berkonsultasi selama penyusunan skripsi dan menjadi tutor SPSS.
12. Tim II KKN Desa Kambangan, Kec. Blado, Batang: Lina, Infra, Ika, Ipunk, Naval, Sigit, Danis, Ogi. Terima kasih untuk pengalaman, kenangan, dukungan, dan persahabatan yang terjalin hingga saat ini. *It's memorable moments to know you all in 30 days.*
13. Teman-teman seperjuangan dan seperbimbingan: Prima, Iwak, Pempi, Arin, Toyek. Terima kasih untuk dukungannya satu sama lain.
14. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler I angkatan 2009. Terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin, sukses untuk kita semua.
15. Keluarga Mahasiswa Akuntansi FEB, terimakasih untuk proses dan kesempatan-kesempatan berorganisasi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat lebih berkembang lagi.
16. Keluarga Pelayanan Rohani Mahasiswa Katholik FEB, terima kasih untuk semua proses, pengalaman, dan persahabatan yang terjalin selama ini.
17. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca dan dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

Semarang, 13 Maret 2013

Penulis

Ema Diandra Adjani

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Agensi.....	15
2.1.2 <i>Corporate Governance</i> .....	18
2.1.3 Opini Audit.....	20
2.1.4 Opini Audit <i>Going Concern</i> .....	22
2.1.5 Komisaris Independen.....	27
2.1.6 Kepemilikan Manajerial.....	29
2.1.7 Kepemilikan Institusional.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32

2.3	Kerangka Penelitian.....	35
2.4	Hipotesis.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	41
3.1.1	Varibel Dependen.....	41
3.1.2	Variabel Independen.....	41
3.2	Populasi dan Sampel.....	43
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	44
3.5	Metode Analisis.....	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2	Analisis Regresi Logistik.....	45
3.5.2.1	Uji Multikolinieritas.....	46
3.5.2.1	Menilai Model Fit ( <i>Overall Model Fit Test</i> ).....	46
3.5.2.2	<i>Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit</i> .....	47
3.5.2.3	Koefisien Determinasi ( <i>Nagelkerke R Square</i> ).....	48
3.5.2.4	Estimasi Parameter dan Intepretasinya.....	48
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.2	Analisis Data.....	50
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2	Analisis Regresi Logistik.....	52
4.2.2.1	Uji Multikolinieritas.....	52
4.2.2.2	Menilai Model Fit ( <i>Overall Model Fit Test</i> ).....	53

4.2.2.3	<i>Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit</i> .....	54
4.2.2.4	Koefisien Determinasi ( <i>Nagelkerke R Square</i> ).....	55
4.2.2.5	Pengujian Hipotesis.....	56
4.3	Pembahasan.....	58
4.3.1	Hipotesis Pertama.....	58
4.3.2	Hipotesis Kedua.....	59
4.3.3	Hipotesis Ketiga.....	61
BAB V	PENUTUP.....	62
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Keterbatasan.....	64
5.3	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel Peneilitian.....	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas.....	52
Tabel 4.4 <i>Uji Overall Fit Model</i> .....	53
Tabel 4.5 <i>Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i> .....	55
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi ( <i>Nagelkerke R Square</i> ).....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis.....	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Panduan Bagi Auditor dalam Memberikan Opini Audit Going Concern.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	70
Lampiran B Tabulasi Data Perusahaan <i>Going Concern</i> dan <i>Non Going Concern</i> .....	71
Lampiran C Data Output SPSS.....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peran investor saat ini turut memberikan andil besar dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan melalui penanaman modal saham dan tentunya mengharapkan adanya *return* yang besar atas investasi yang telah dilakukannya. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya, perusahaan dituntut tidak hanya meningkatkan laba semata, melainkan mengoptimalkan kinerja perusahaan agar terhindar dari kesulitan keuangan, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup (*going concern*) usahanya secara terus menerus dan menerima opini audit *non going concern* dari auditor.

*Going concern* merupakan salah satu asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Asumsi ini mengharuskan perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*). Menurut Prapitorini dan Januarti (2007), kelangsungan hidup suatu usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi, bila auditor mengeluarkan opini *going concern* atas laporan keuangan perusahaan, hal ini berarti auditor menemukan adanya kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

*Going concern* adalah kelangsungan hidup entitas dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan, sehingga jika entitas mengalami kondisi yang

berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut menjadi bermasalah (Petronila, 2004). Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas (perusahaan) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2004) maka dapat disimpulkan bahwa opini audit *going concern* merupakan opini yang diberikan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor melalui opininya terangkum dalam laporan audit mulai diminta tanggung jawabnya untuk mengungkapkan kelangsungan usaha suatu entitas (Solikah, 2007). Auditor juga bertanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP Seksi 341, 2001).

Penilaian dan opini auditor terhadap status kelangsungan hidup perusahaan sangat dibutuhkan para pengguna laporan keuangan terutama pihak investor dalam membuat keputusan investasi. Oleh karena itu auditor berperan penting dalam menjembatani antara kepentingan pengguna laporan keuangan termasuk investor dengan kepentingan perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih dipercaya oleh investor dan pengguna laporan keuangan lainnya apabila auditor mengeluarkan opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menjamin angka–angka akuntansi yang disajikan telah diaudit bebas dari salah saji material. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit,

maka pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya (Komalasari, 2004).

Iskandar et al., (2011) mengungkapkan berdasarkan *Malaysian Institute of Accountants*, bahwa pernyataan auditor tentang adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan hidupnya seringkali diberikan opini audit wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*) dan opini audit tidak wajar (*adverse opinion*) oleh auditor. Di Indonesia, berdasarkan SPAP SA Seksi 341, terdapat beberapa kondisi dan peristiwa yang menjadi bahan pertimbangan auditor dalam membuat asumsi *going concern*, yaitu seperti tren negatif, kesulitan keuangan, masalah intern, dan masalah luar yang terjadi. Apabila setelah mempertimbangkan kondisi dan peristiwa tersebut auditor menemukan adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan hidupnya, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*unqualified opinion without explanatory language*), atau pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), atau pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), ataupun pendapat tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Menurut Allan Chang (2004) dalam Iskandar et al., (2011) *going concern* adalah masalah yang paling umum yang timbul dari peningkatan kerugian, penurunan operasi, restrukturisasi dan pembubaran bisnis untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria probabilitas pemberian opini *going concern* oleh auditor tidak hanya berasal dari kinerja keuangan perusahaan yang seringkali

diukur menggunakan rasio keuangan seperti pada penelitian–penelitian terdahulu, melainkan dapat juga diukur dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri.

*Organization of Economics Cooperation and Development* (OECD, 2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Shleifer dan Vishny (1997) mengungkapkan bahwa *corporate governance* dipandang sebagai mekanisme yang menjamin investor eksternal menerima pengembalian yang tepat atas investasinya. *Corporate governance* yang kuat menjamin tingkat transparansi sistem keuangan yang tinggi dalam menjaga kepercayaan investor. *Corporate governance* yang efektif memberikan jaminan atas keamanan dana yang diinvestasikan dan pengembalian investasi (Noordin, 1999 dalam Iskandar et al, 2011). Rendahnya tingkat transparansi dalam sistem keuangan dan buruknya sistem pengambilan keputusan adalah fenomena umum yang terjadi dalam tata kelola perusahaan yang lemah. Sebagian besar perusahaan

dengan *corporate governance* yang lemah dihadapkan dengan masalah keuangan dibandingkan dengan *corporate governance* yang kuat (Mitton, 2002).

Perhatian akan *corporate governance* di Indonesia muncul karena terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang kemudian berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis. Untuk mengatasi masalah tersebut, berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2004. Pedoman ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah dengan memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Selain peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan yang mengharuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Peraturan tersebut diantaranya yaitu: (1).Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/PM PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 Tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan Perseroan; (2).Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal penerapan GCG yang baik pada

BUMN di Indonesia; (3).Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Keberadaan peraturan-peraturan tentang penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut diharapkan dapat membawa tata kelola dan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik lagi, sehingga keberlangsungan perusahaan pun dapat terjaga. Namun pada kenyataannya, masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* secara konsisten, sehingga menyebabkan timbulnya skandal pelaporan keuangan. PT. Kimia Farma Tbk. terdeteksi memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba hingga Rp 32,7 milyar. PT. Indofarma melakukan praktik *earning management* dengan menyajikan *overstated* laba bersih senilai Rp 28,870 milyar, sebagai dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut *understated*.

Penerapan *corporate governance* sangat erat kaitannya dengan *going concern problems*. *Corporate governance* yang buruk menandakan bahwa perusahaan tidak dijalankan dan diawasi dengan baik, sehingga menyebabkan buruknya kinerja perusahaan dan masalah keuangan (Iskandar et al., 2011). Oleh karena itu, auditor cenderung memberikan opini *going concern* bagi perusahaan yang mengalami masalah keuangan, karena kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (*going concern*) usahanya pun semakin diragukan. Masalah *going concern* ini dapat dicegah dan diatasi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) menjelaskan bahwa demi terwujudnya pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berimplikasi terhadap kinerja perusahaan yang baik, sehingga kemungkinan auditor memberikan opini *going concern* pada perusahaan pun kecil.

Mekanisme *corporate governance* dapat mempengaruhi auditor dalam memberikan opini *going concern*. Menurut Hartas (2011) mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau arah kebijakan yang ditetapkan. Mekanisme diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem *governance* dalam suatu perusahaan (Petronila, 2007). Mengacu pada penelitian yang dilakukan Iskandar et al., (2011), mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Komisaris independen merupakan badan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana dan Herawati, 2007). Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan

dan urusan bisnis apapun yang dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001). Hasil penelitian Iskandar et al., (2011) dan Linoputri (2011) menyatakan proporsi dewan komisaris independen secara signifikan tidak berhubungan dengan masalah *going concern* (*going concern problems*), sehingga tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor. Namun penelitian Petronila (2007) menyatakan keberadaan komisaris independen mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit *going concern* dikarenakan keberadaan komisaris independen dapat menyelaraskan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder*.

Pihak manajemen berperan penting dalam mengelola dan mempertahankan keberlangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Namun tidak jarang juga terjadi perbedaan kepentingan dengan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial, pihak manajemen dapat merasakan manfaat atas pengambilan keputusan sekaligus menanggung konsekuensi atas kesalahan pengambilan keputusan (Linoputri, 2011). Adanya prosentase kepemilikan anggota dewan dalam perusahaan yang semakin besar, maka anggota dewan tersebut akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja operasional karena merasa memiliki perusahaan, sehingga



tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dan berkembang melalui peningkatan pengendalian (Petronila, 2007). Oleh karena itu, diharapkan semakin tinggi kepemilikan manajemen perusahaan maka semakin rendah tingkat konflik kepentingan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham, sehingga semakin kecil kemungkinan terjadinya *going concern problems* dan kemungkinan auditor memberikan opini *going concern* pada perusahaan pun kecil. Penelitian Iskandar et al., (2011) menyatakan kepemilikan manajerial memiliki hubungan terbalik (negatif) dengan masalah *going concern (going concern problems)*. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajemen maka semakin rendah *going concern problems* yang dihadapi perusahaan sehingga berimplikasi terhadap kecilnya kemungkinan auditor memberikan opini *going concern* pada perusahaan. Berbeda dengan penelitian Januarti (2008) yang menemukan bahwa meskipun ada kepemilikan manajerial dan institusional ternyata fungsi pengawasan yang ada belum menjamin untuk tidak diberikannya opini audit *going concern*, karena untuk meningkatkan kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Kepemilikan instiusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen (Iskandar, 2011). Short dan Kesay (1999), Morek et al, (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Januarti (2008) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada *monitoring* atas keputusan manajemen. Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akan mendorong kinerja

manajemen menjadi lebih baik atau sesuai yang diharapkan investor, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Setiawan, 2011). Dengan demikian masalah *going concern* perusahaan semakin kecil, sehingga berimplikasi terhadap kecilnya kemungkinan auditor memberikan opini *going concern* pada perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Iskandar et al., (2011) yang bertujuan menguji hubungan antara *Corporate Governance* dengan *Going Concern Problems*. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu, yaitu mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Variabel terikatnya adalah opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti tidak menggunakan variabel struktur kepemimpinan *board of directors*. Alasannya adalah adanya perbedaan sistem yang digunakan Malaysia dan Indonesia. Malaysia menggunakan *one tier system* dimana pengawas perusahaan disebut *board* dan pengurus perusahaan disebut *key executives*, sedangkan Indonesia menggunakan *two tier system*.

OECD (2006) menyatakan dalam *one tier system* hanya terdapat satu dewan (*board*) yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif. Pada sistem ini, tidak ada perbedaan posisi pada direktur yang duduk dalam komite pengendalian manajemen dan direktur lain. Pada umumnya keanggotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak dipisahkan, sehingga anggota Dewan

Komisaris merangkap sebagai anggota Dewan Direksi dan kedua dewan ini dirujuk sebagai *board of directors*. Indonesia menggunakan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh *Board of Commissioner* dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh *Directors*. Pada sistem *two tier* dalam susunan dewan terdapat Dewan Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam kerangka tata kelola perusahaan, sebab Dewan Direksi sebagai pihak eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya.

Peneliti tertarik meneliti hubungan *corporate governance* dengan *going concern problem* yang diproksikan dengan opini audit *non going concern* dan opini audit *going concern*, karena masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* sehingga berdampak pada kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Peneliti menggunakan *corporate governance* sebagai variabel bebas karena, kebanyakan penelitian sebelumnya menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai ukuran kinerja perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*) usahanya dan menunjukkan hasil yang konsisten.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut tentang *corporate governance* kaitannya dengan kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen. Peneliti menggunakan data

perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Keberadaan suatu entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya kemungkinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menjawab rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

2. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan instirtusional terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.

### **1.3.2 Kegunaan Peneilitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan yang berguna dalam mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan di masa depan.

3. Bagi Akuntan

Hasil penelitian ini dapat digunakan bahan diskusi dan refrensi bagi auditor dalam pelaksanaan proses audit terutama dalam pemberian opini audit.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai proses pemberian opini audit, terutama opini audit *going concern*.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, pemilihan sampel, data yang diperlukan, sumber pengumpulan data, metode analisis, pengolahan data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

## **BAB II**

### **TIJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori agensi**

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kontrak antara agen (manajemen) dengan pemilik (prinsipal). Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan (Sari, 2007). Oleh karena itu, agen mempunyai lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan prinsipal. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai *information asymetries* (Jensen dan Meckling, 1976).

Asimetri informasi terjadi karena agen (manajemen) memiliki informasi yang lebih lengkap atas keadaan internal perusahaan yang sebenarnya dan prospek perusahaan dimasa depan dibandingkan dengan pemilik (prinsipal). Baik prinsipal maupun agen mempunyai kepentingan ekonomis yang berbeda dan berusaha memaksimalkannya. Prinsipal menginginkan laba yang sebesar-besarnya atau peningkatan nilai investasi dalam perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang memadai atas kinerja yang dilakukan (Sari, 2012). Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik, sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut.

Adanya ketimpangan informasi (*information asymmetries*) ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan mengontrol tindakan-tindakan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) permasalahan tersebut adalah:

- (1) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul karena adanya benturan kepentingan antara agen dengan prinsipal yang dapat mengarah pada tindakan kecurangan atau penipuan agen kepada prinsipal.
- (2) *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana agen jauh lebih mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya dan prospeknya dimasa depan dibandingkan prinsipal, sehingga menyebabkan pilihan-pilihan keputusan investasi yang merugikan prinsipal.

Agen sebagai pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan bertanggung jawab dalam menghasilkan laporan keuangan yang memadai, artinya informasi di dalam laporan keuangan tersebut diharapkan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan prinsipal dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga diharapkan laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Keberadaan agen sebagai pihak yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan prinsipal, dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan dengan memanipulasi data atas kondisi perusahaan yang merupakan bentuk *moral hazard* manajer. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material dan tidak diberikan opini



*going concern* oleh auditor dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan kepentingan agen. *Information asymmetries* yang terjadi antara agen dan prinsipal juga menyebabkan *adverse selection*. Lebih sedikitnya informasi yang dimiliki prinsipal tentang perusahaan dibandingkan agen, dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan investasi, karena prinsipal mungkin dapat membatalkan investasinya atau berinvestasi dengan beberapa persyaratan, seperti menginginkan harga saham yang rendah. Hal ini berdampak buruk pada keberlangsungan hidup (*going concern*) perusahaan dimasa depan, sehingga kemungkinan auditor memberikan opini *going concern* semakin besar.

Oleh karena itu, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah akuntan publik. Auditor berperan dalam menjembatani kepentingan manajer dan pemilik perusahaan. Auditor juga berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (prinsipal) (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hal ini auditor memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan dan mengungkapkan permasalahan *going concern* yang dihadapi perusahaan apabila auditor meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Rudyawan dan Bandera, 2008).

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agensi, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (OECD, 2004). Upaya ini kemudian menimbulkan biaya agensi. Biaya agensi ini meliputi biaya

pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena penurunan nilai kepemilikan pemegang saham (OECD, 2004).

### **2.1.2 Corporate Governance**

Seluruh entitas bisnis terutama yang *go public* harus terus dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dan meningkatkan nilainya agar semakin banyak investasi yang dapat diperoleh untuk membiayai aktivitas perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai suatu mekanisme untuk menjalankan dan mengarahkan perusahaan. *Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Darmawati dkk., 2004).

Sir Adrian Cadbury (*Global Corporate Governance Forum – World Bank, 2003*) menjelaskan *corporate governance* merupakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial serta tujuan individu dan tujuan komunitas. Disamping itu juga menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang memperhatikan seluruh kepentingan, baik individu, perusahaan, dan masyarakat. Syakhroza (2002) dalam OECD (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang dipakai *board* untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) pengelolaan sumber

daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P) dengan prinsip-prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan terhindar dari masalah *going concern*, suatu perusahaan harus memenuhi unsur-unsur *good corporate governance*. Secara umum prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdiri dari:

1. **Keadilan** (*fairness*), yaitu menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. **Transparansi** (*transparency*), yaitu mewajibkan adanya suatu sistem informasi terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
4. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
5. **Independensi** (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Elemen-elemen mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

### **2.1.3 Opini Audit**

Auditor melalui opininya terangkum dalam laporan audit mulai diminta tanggung jawabnya untuk mengungkapkan kelangsungan usaha suatu entitas (Solikah, 2007). Paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Terdapat lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor (Mulyadi, 2009), yaitu :

#### **1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).**

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi berikut ini :

- a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
- c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

**2. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas**  
*(Unqualified Opinion Report with Explanatory Language)*

Auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien.

**3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian jika terdapat kondisi sebagai berikut :

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

#### **4. Pendapat tidak Wajar (*Adverse Opinion*)**

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pengguna informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

#### **5. Pendapat tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)**

Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah :

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

#### **2.1.4 Opini Audit Going Concern**

Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). *Going concern* dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan (*contrary information*). Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan

dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva pada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa lainnya (SA Seksi 341, 2001).

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit dengan cara sebagai berikut (SA Seksi 341, 2001):

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, auditor harus :
  - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
  - b. Menentukan apakah rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.

Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (SA Seksi 341, 2001):

**1. Tren negatif**

Contoh: kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.

**2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan**

Contoh: kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.

**3. Masalah intern**

Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

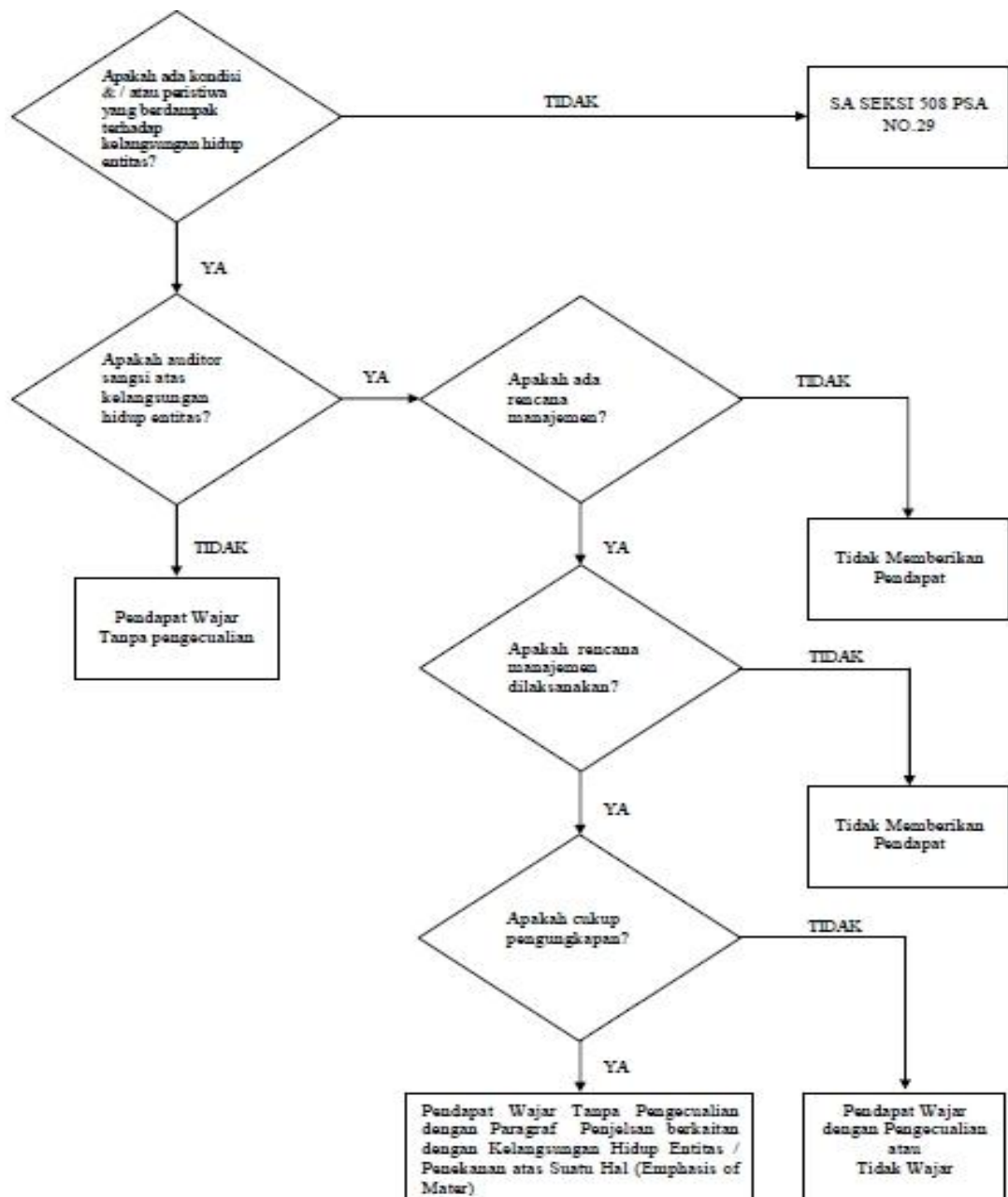
**4. Masalah luar yang telah terjadi**

Contoh: pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas



untuk beroperasi; kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

**Gambar 2.1**  
**Panduan Bagi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Going Concern**



Sumber : Seksi 341 Paragraf 19 (SPAP: 2001)

Berdasarkan SPAP Seksi 341 (2001), apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tersebut auditor tidak menyangsikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, maka auditor memberikan **pendapat wajar tanpa pengecualian**. Apabila auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Jika rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan untuk mengatasi dampak dari kondisi dan peristiwa yang menyebabkan kesangsian terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor memberikan pendapat **wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas**. Sebaliknya, jika satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen perusahaan tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa peristiwa yang menyebabkan kesangsian terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor menyatakan **tidak memberikan pendapat. Pendapat tidak wajar** diberikan auditor jika pengungkapan di dalam rencana manajemen yang dilaksanakan perusahaan tidak memadai dan tidak dilakukan penyesuaian, sehingga dampaknya sangat material dan terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Apabila auditor menyangsikan kelangsungan hidup perusahaan dan auditor berkesimpulan bahwa manajemen perusahaan tidak membuat pengungkapan mengenai sifat, dampak, kondisi, dan

peristiwa yang menyebabkan auditor menyangsikan kelangsungan hidup perusahaan, maka auditor memberikan **pendapat wajar dengan pengecualian**.

### **2.1.5 Komisaris Independen**

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2001), Dewan Komisaris merupakan salah satu unsur terpenting dari *corporate governance* yang memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Tugas Dewan Komisaris dalam mencegah munculnya status *going concern* meliputi: memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Namun dalam prakteknya Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga diperlukan Dewan Komisaris yang benar-benar independen.

Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang objektif, dan menempatkan keadilan

(*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya (Andayani, 2010). Peran komisaris independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN (FCGI, 2001).

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan Kep-361/BEJ/06-2000 tanggal 1 Juli 2000 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun kriteria lainnya tentang Komisaris Independen yang dikemukakan oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, yaitu:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendalian (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan / atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Petronila (2007) menjelaskan keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholders*, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini *going concern*.

Hasil penelitian Ramadhany (2004) Iskandar et al., (2011) menyatakan proporsi komisaris independen secara signifikan tidak berhubungan dengan masalah *going concern (going concern problems)*, sehingga tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor. Namun hasil penelitian Setiawan (2011) mengungkapkan adanya pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan. Proporsi komisaris independen yang lebih besar mampu memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga kecil kemungkinan perusahaan mengalami masalah *going concern* dan kemungkinan auditor memberikan opini *going concern* pun kecil.

#### **2.1.6 Kepemilikan Manajerial**

Gideon (2005) menyatakan kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial meliputi pemegang saham yang memiliki

kedudukan dalam perusahaan sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris, atau bisa juga dikatakan kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer dan direktur perusahaan. Kepemilikan ini akan menyetarakan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebab dengan besarnya saham yang dimiliki, pihak manajemen diharapkan akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham, karena besar kecilnya kepemilikan manajerial menggambarkan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka para manajer termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Herawaty (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba dan merupakan sarana *monitoring* yang efektif yang dapat membawa pada kualitas pelaporan yang lebih tinggi, sehingga opini audit yang diberikan auditor atas laporan keuangan perusahaan cenderung merupakan opini yang bersih (*clean opinion*).

Ada beberapa penelitian berkaitan dengan kepemilikan perusahaan, diantaranya penelitian Linoputri (2010) menunjukkan adanya pengaruh besar kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan, semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan. Namun hasil penelitian Januarti (2008) menunjukkan

sebaliknya, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini *going concern* oleh auditor.

### **2.1.7 Kepemilikan Institusional**

Menurut Beiner et al., (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dengan adanya kepemilikan institusional seperti kepemilikan oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen perusahaan sehingga akan menjamin peningkatan kemakmuran para pemegang saham.

Short dan Keasy (1999), Morek et al., (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Janurati (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan demikian diharapkan ada *monitoring* atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan yang dapat mengimplikasikan auditor tidak memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, sehingga akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga tercapainya peningkatan kinerja yang ditandai juga dengan harapan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (Setiawan, 2011).

Penelitian Iskandar et al., (2011) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan. Namun penelitian Setiawan (2011) dan Januarti (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu tentang opini audit *going concern* terangkum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

PENELITI & TAHUN	SAMPEL	VARIABEL INDEPENDEN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
Ramadhany (2004)	86 perusahaan manufaktur	Komisaris Independen dalam Komite Audit, <i>Debt Default</i> , Kondisi Keuangan, Laporan Audit Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan Skala Auditor.	Regresi Logistik	<i>Debt default</i> , kondisi keuangan, dan opini tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini <i>going concern</i> . Sedangkan komisaris independen dalam komite audit tidak berpengaruh pada opini <i>going concern</i> .
Januarti (2008)	45 perusahaan	Faktor Perusahaan,	Regresi Logistik	<i>Debt default</i> , <i>audit tenure</i> ,



	manufaktur	Kualitas Audit, Kepemilikan Perusahaan.		opini audit sebelumnya, dan kualitas audit secara signifikan berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . sedangkan <i>financial distress, audit lag, opinion shopping</i> , kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap opini <i>going concern</i> .
Linoputri (2010)	71 perusahaan manufaktur	Kepemilikan Terpusat, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen dan Keberadaan Komite Audit.	Regresi Logistik	Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> . Sedangkan konsentrasi kepemilikan, keberadaan kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini <i>going</i>

				<i>concern.</i>
Iskandar et al., (2011)	112 perusahaan	Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemimpinan <i>Board of Directors</i> , Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Investor Intitusal	Regresi Logistik	Dewan komisaris independen secara signifikan tidak berhubungan dengan <i>going concern problem</i> , struktur kepemimpinan <i>board of directors</i> secara signifikan berhubungan positif dengan <i>going concern problem</i> , sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara signifikan berhubungan negatif dengan <i>going concern problem</i> .
Setiawan (2011)	16 perusahaan manufaktur	Faktor Perusahaan ( <i>financial distress</i> , opini audit sebelumnya, dan <i>debt default</i> ), Kualitas Audit, dan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	Regresi Logistik	<i>Financial distress</i> dan opini audit sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> . komisaris independen berpengaruh

		(komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit)		negatif dan signifikan terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> . Sedangkan <i>debt default</i> , kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> .
--	--	---	--	---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

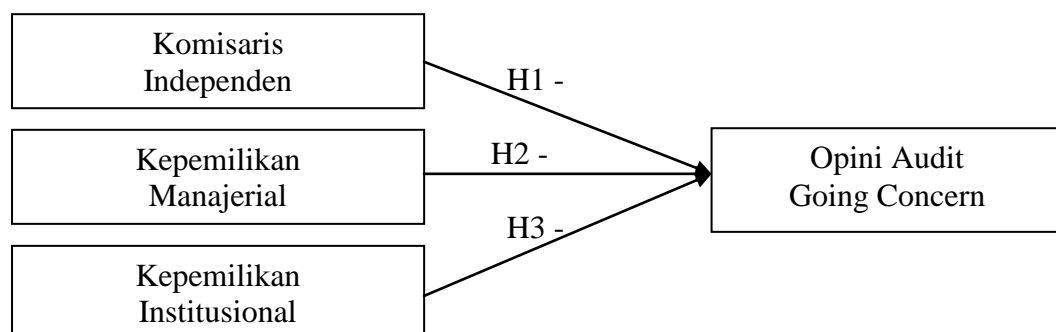
Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah dalam memahami pengaruh antara Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional. Kerangka pemikiran tersebut disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

#### **Kerangka Pemikiran Penelitian**

##### **Variabel Independen**

##### **Variabel Dependen**



## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kemungkinan Pemberian Opini Audit *Going Concern* oleh Auditor Independen**

Didalam Teori Agensi dijelaskan bahwa permasalahan antara manajemen dan pemilik muncul karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya, sehingga dibutuhkan pengawasan dari pihak independen dalam hal ini komisaris independen agar manajemen bertindak sesuai keinginan pemilik dan tidak melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan pemilik, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.

Keberadaan komisaris independen telah diatur oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan Kep-361/BEJ/06-2000 tanggal 1 Juli 2000 yang menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan yang tercatat di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*) dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan dan pengaruh komisaris independen terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan. Selain itu, tingginya pengawasan komisaris independen dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara agen (manajemen) dengan prinsipal (pemilik), sehingga dapat mencegah tindakan manipulasi atas laporan

keuangan yang biasanya dilakukan manajemen untuk memenuhi kepentingannya, yaitu mendapatkan kompensasi yang tinggi bila laba perusahaan meningkat. Hal ini diharapkan dapat membawa pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas, sehingga kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit *going concern* semakin kecil.

Hasil penelitian Setiawan (2011) mengungkapkan adanya pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Iskandar et al., (2011) yang menyatakan proporsi komisaris berhubungan negatif dengan *going concern problems* yang diprosikan dengan opini *going concern*. Proporsi komisaris independen yang lebih besar mampu memberikan pengawasan yang lebih baik sehingga kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* kecil. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

**H1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.**

#### **2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Terhadap Kemungkinan Pemberian Opini Audit *Going Concern* oleh Auditor Independen**

Berdasarkan Teori Agensi, dijelaskan bahwa terdapat benturan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga diperlukan adanya mekanisme insentif untuk mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan

pemilik, yaitu salah satunya melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan opini audit *going concern*. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka semakin mengurangi konflik keagenan di dalam perusahaan, sehingga membuat hubungan manajer dengan pemegang saham menjadi selaras karena adanya kesamaan kepentingan. Hal ini dikarenakan manajer akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, sehingga kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan pun kecil.

Herawaty (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba dan merupakan sarana *monitoring* yang efektif yang dapat membawa pada kualitas pelaporan yang lebih tinggi, sehingga opini audit yang diterima atas laporan keuangan perusahaan cenderung merupakan opini yang bersih (*clean opinion*).

Penelitian Iskandar et al., (2011) juga mengungkapkan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara kepemilikan manajerial dengan *going concern problems* yang diprosikan dengan opini *going concern*. Hal ini sejalan dengan penelitian Linoputri (2010) yang mengungkapkan semakin besar kepemilikan manajerial maka auditor cenderung memberikan opini audit *non going concern* pada perusahaan. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

**H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.**

### **2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kemungkinan Pemberian Opini Audit *Going Concern* oleh Auditor Independen**

Teori Agensi menjelaskan adanya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk menjalankan perusahaan, serta adanya kepentingan prinsipal untuk memperoleh *return* yang besar atas investasinya. Oleh karena itu, pemilik (prinsipal) melakukan *monitoring* atas aktivitas dan proses pengambilan keputusan manajemen agar bertindak sesuai dengan keinginannya.

Kepemilikan instutisional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi-institusi lainnya. Iskandar et al., (2011) menyatakan investor institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal pada manajemen. Dampak positif dari investasi institusional menunjukkan bahwa investor institusional mampu bertindak lebih efektif untuk memonitor aktivitas dan keputusan manajemen dibandingkan investor perorangan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih

optimal (Permanasari, 2011). Short dan Keasy (1999), Morek et al., (1998), Mc Connell dan Servaes (1990, 1995) serta Kole (1995) dalam Janurati (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan demikian, diharapkan adanya *monitoring* atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan yang berimplikasi pada kecilnya kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan opini audit *going concern*. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka pengawasan investor institusional terhadap kinerja dan setiap keputusan yang diambil manajer pun semakin tinggi. Oleh karena itu, manajer akan meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Iskandar et al., (2011) yang mengungkapkan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan opini audit *going concern*. Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

**H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor independen.**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen baik secara positif atau pun negatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit *going concern*. Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan karena dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya (SPAP, 2001). Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*. Kode 1 untuk opini audit *going concern*, sedangkan kode 0 untuk opini audit *non going concern*. Variabel ini dinyatakan dengan lambang GC.

##### **3.1.2 Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif atau pun negatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Proporsi Komisaris Independen**

Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta

bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Proporsi komisaris independen dapat dihitung dengan persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris. Peraturan Kep-361/BEJ/06-2000 tanggal 1 Juli 2000 menjelaskan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Variabel ini dinyatakan dengan lambang IND\_COMM.

## **2. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh manajer, direktur, dan komisaris dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham dalam perusahaan yang dimiliki manajer, direktur, dan komisaris dari seluruh modal saham yang beredar. Variabel ini dinyatakan dengan lambang MAN\_OWN.

## **3. Kepemilikan Institusional**

Menurut Beiner et al., (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh seluruh institusi pemegang saham perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki seluruh institusi pemegang saham perusahaan dari seluruh modal saham yang beredar. Variabel ini dinyatakan dengan lambang INST\_OWN.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Sektor manufaktur dipilih sebagai sampel penelitian untuk menghindari adanya *industrial effect* yaitu resiko industri yang berbeda antara suatu sektor industri yang satu dengan yang lain (Setyarno dkk, 2006). Selain itu, sektor manufaktur dipilih karena memiliki tingkat kompetisi yang kuat sehingga rawan terhadap kasus-kasus kecurangan dan masalah *going concern* (Setiawan, 2011).

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan memasangkan antara perusahaan yang diberikan opini audit *going concern* dengan perusahaan yang diberikan opini audit *non going concern* oleh auditor independen. Ada pun kriteria sampel perusahaan manufaktur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2009-2011.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode penelitian 2009-2011.
3. Perusahaan mengungkapkan laporan auditor independen didalam laporan keuangannya yang telah diaudit selama periode penelitian 2009-2011.
4. Perusahaan yang dipasangkan, yaitu perusahaan yang diberikan opini audit *going concern* dan perusahaan yang diberikan opini audit *non going concern* harus memiliki total *asset* yang sama atau minimal jumlahnya mendekati dan berada dalam satu jenis industri.

5. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang Tata kelola Perusahaan dalam *annual report*, yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional.

### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa *annual report* dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011. Data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* dan dari situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), Pojok BEI Pandanaran, dan [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com).

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan auditan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011, yang memuat proporsi kepemilikan, jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen serta informasi keuangan dan opini audit yang terdapat dalam laporan keuangan.

### **3.3 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel – variabel dalam penelitian. Penelitian menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari

nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi setiap variabel yang digunakan (Ghozali, 2005).

### 3.3.2 Analisis Regresi Logistik

Pada penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*). Regresi logistik sebetulnya mirip dengan dengan analisis diskriminan yaitu kita ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2005).

Pengujian hipotesis regresi logistik (*logistic regression*), digunakan apabila variabel bebasnya merupakan kombinasi *metric* dan *non metric* (nominal). Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005). Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln} \frac{\text{GC}}{\text{GC}-1} = \alpha + \beta_1 \text{IND\_COMM} + \beta_2 \text{MAN\_OWN} + \beta_3 \text{INST\_OWN} + e$$

Keterangan :

$$\text{Ln} \frac{\text{GC}}{\text{GC}-1} = \text{Opini audit, berupa opini audit } \textit{going concern} \text{ (diberi nilai 1) dan opini audit } \textit{non going concern} \text{ (diberi nilai 0)}$$

$\alpha$  = Konstanta

IND\_COMM = Persentase Komisaris Independen dari total Dewan Komisaris

MAN_OWN	= Proporsi saham biasa yang dipegang oleh anggota Dewan Direksi
INST_OWN	= Persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar
$e$	= Kesalahan Residual

### 3.3.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Uji multikolinieritas dalam regresi logistik dilakukan dengan melihat nilai matriks korelasinya (*correlation matrix*). Model regresi logistik yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya, atau nilai matriks korelasinya (*correlation matrix*) kurang dari 0.7.

### 3.3.2.2 Menilai Model Fit (*Overall Model Fit Test*)

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah *fit* atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model *fit* adalah:

H0 : Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data

Dari hipotesis diatas, agar model *fit* dengan data maka H0 harus diterima. Statistik yang digunakan berdasarkan *Likelihood*. *Likelihood L* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternative,  $L$  ditransformasikan menjadi  $-2 \text{ Log}L$ . Output SPSS memberikan dua nilai  $-2 \text{ Log}L$  yaitu satu untuk model yang hanya

memasukkan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta tambahan bebas. Adanya pengurangan nilai antara  $-2\text{Log}L$  awal dengan nilai  $-2\text{Log}L$  pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data (Ghozali, 2006). *Log Likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan model *Log Likelihood* menunjukkan model regresi yang semakin baik.

### 3.3.2.3 Uji *Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test*

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test*. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan *fit*). Adapun hasilnya jika (Ghozali, 2006):

- 1) Nilai statistik *Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.
- 2) Nilai statistik *Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

#### **3.3.2.4 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)**

*Nagelkerke R Square* merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Nilai *Nagelkerke R Square* bervariasi antara 1(satu) dan 0 (nol). Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin *goodness of fit* sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak *goodness of fit* (Ghozali, 2006).

#### **3.3.2.5 Estimasi Parameter dan Interpretasinya**

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (*sig*). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.